

PROSIDING



Seminar Nasional

Paradigma Perempuan Hindu
Masa Kini dalam Menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

20 April 2016



Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
2016

**Prosiding Seminar Nasional:
Paradigma Perempuan Hindu Masa Kini dalam Menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)**

Penulis : Pembicara pada Seminar Nasional
Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Penanggungjawab : Dr. Ni Putu Winanti, S.Ag., M.Pd.

Editor : Dr. I Gede Suwantana, S.Ag., M.Ag

Cover Design : I Putu Andre Suhardiana, S.Pd., M.Pd

Penerbit : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
Jl. Ratna Tatasan, no. 51
Denpasar, Bali, Indonesia - 80237
Phone: +62361 228665
Fax: +62361 228665
E-mail: gcdesuwantana@gmail.com

Cover's Picture : Wanita Hindu Bali

Dicetak April 2016

ISBN: 978-602-72630-5-5

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PENGANTAR EDITOR	iv
DAFTAR ISI	v

**POSISI STRATEGIS PEREMPUAN BALI DALAM KEGIATAN
GENDER DUNIA TERKAIT KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN & ANAK**

Dr. SITA T. VAN BEMMELEN 1

**EKSISTENSI PEREMPUAN HINDU PADA KEGIATAN
KELUARGA, AGAMA DAN PEKERJAAN**

NI NYOMAN SUKERNI, S. H. 10

PENYAKIT KELAMIN DAN HIV AIDS

dr. IDA BAGUS GEDE EKAPUTRA 20

**PATTERN OF WORKING TIME DISTRIBUTION OF BALINESE
HINDU WOMEN IN FACING ASEAN ECONOMIC COMMUNITY**

MADE SRI PUTRI PURNAMAWATI 27

MENGUATKAN KONSTRUKSI SOSIO-KULTURAL LUH LUWIH

Agenda Perempuan Hindu Bali Memasuki Masyarakat Ekonomi
Asean

NI WAYAN KARMINI 31

PEREMPUAN HINDU DAN PENDIDIKAN ANAK

Analisis terhadap Peran Ibu dalam Kesuksesan Anak Bersaing
pada Era Global

I GEDE SUWANTANA 38

**HAK DAN STATUS SOSIAL WANITA HINDU
DALAM MASYARAKAT PATRILINIAL**

NI PUTU SAWITRI NANDARI 48

**PEREMPUAN HINDU PEKERJA, PELANGGEMAN ATAS
KULTURAL DAN STRUKTURAL**

NI PUTU SUWARDANI 57

**PERJUANGAN EMANSIPASI WANITA R.A KARTINI
DAN PENGARUHNYA TERHADAP CORAK
FEMINISME DI INDONESIA**

MARSONO 72

**MENINGKATKAN PERILAKU KEWIRAUSAHAAN WANITA HINDU
MELALUI PEMBERIAN PELATIHAN UPAKARA**

Dr. I KETUT SUDARSANA, S. Ag., M. Pd. H 79

PERGAULAN BEBAS DAN PERAN WANITA DALAM AJARAN HINDU

I G. AGUNG JAYA SURYAWAN 86

**KEWAJIBAN DAN HAK WANITA HINDU
DALAM MASYARAKAT PATRILINIAL**
I GEDE DHARMAN GUNAWAN, S. H., S. Pd. H., M. Pd. H. 93

**HIDUP DI TENGAH SISTEM KEKELUARGAAN PATRILINEAL:
KEKUATANKAH ATAU KELEMAHAN BAGI PEREMPUAN HINDU
BALI DALAM ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEN (MEA)?**
MADE DIAH LESTARI 101

**TERRA MATER: MEMULIHKAN PRINSIP
FEMINISME DALAM PARADIGMA PEMBANGUNAN**
KRISNA SUKMA Y 111

**HAK DAN STATUS SOSIAL WANITA HINDU DALAM MASYARAKAT
PATRILINEAL DI BALI**
NI LUH ARJANI 118

**PERAN PEREMPUAN SEBAGAI
PENDIDIK DALAM RUMAH TANGGA**
NI WAYAN SRIANI BINAWATI 125

**PEREMPUAN HINDU
ANTARA SASTRA DAN REALITA KEHIDUPAN**
NI PUTU WINANTI 129

**KESETARAAN GENDER DALAM PEMILUKADA DI BALI
(Suatu Pendekatan Pendidikan Partisipasi)**
NI KETUT SRIE KUSUMA WARDHANI 139

**EVOLUSI KEHIDUPAN: FENOMENA KEJAHATAN HUMAN
TRAFFICKING DAN EKSPLOITASI TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK**
I PUTU ANDRE SUHARDIANA 148

**MANAJEMEN PENANGANAN DISKRIMINASI TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK**
PUTU SANTI OKTARINA 160

WANITA HINDU DAN PERANNYA DALAM KELUARGA
NI WAYAN BUDIASIH 170

**PESAN WEDANTA UNTUK PEREMPUAN HINDU
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**
I MADE DARMA YASA 180

**MENGUATKAN KONSTRUKSI SOSIO-KULTURAL LUH LUWIH
Agenda Perempuan Hindu Bali Memasuki Masyarakat Ekonomi
Asean**

NI WAYAN KARMINI

Universitas Hindu Indonesia, Denpasar
Email: karmini.niwayan@yahoo.com

Abstract:

Asean Economic Community (AEC) has been applied since 2015. The flow of goods, services, capital, investment and labor between countries of ASEAN is opened. All citizens in the Asean region, including the Balinese Hindu's women need to increase their capacity and professionalism to be involved as actors in AEC. This short paper discusses the efforts of Balinese Hindu's women in increase their competitiveness to support their public role and their agenda in entering the ASEAN Economic Community. The study results showed that the Balinese Hindu's women could take on the public role in various fields of work that opens in AEC if they have competitive ability and skill. Competitive skills can be improved through: (a) education efforts; (b) their involvement as NGO activists, activists of mass organizations, or activists of political organizations; (c) self-development efforts of the Balinese Hindu's woman who want to become 'luh luh', the figure of the learned, have specific skills (professional) but still hold tradition and Balinese culture. Increased professionalism and strengthening socio-cultural to make Balinese Hindu's women as 'luh luh' is needed.

Keywords: Balinese Hindu's Woman, Asean Economic Community, Luh luh

Abstrak:

Masyarakat Ekonomi Asean sudah diterapkan sejak 2015. Aliran barang, jasa, modal, investasi dan tenaga kerja antar negara Asean menjadi terbuka. Semua warga negara di wilayah Asean, termasuk kaum perempuan Hindu Bali perlu meningkatkan kapasitas diri dan profesionalitasnya agar bisa terlibat menjadi pelaku dalam perdagangan bebas Asean. Makalah singkat ini membahas upaya perempuan Hindu Bali dalam mengasah kemampuan kompetitifnya untuk menunjang peran mereka di ranah publik dan agenda mereka dalam memasuki masyarakat ekonomi Asean. Hasil kajian menunjukkan bahwa perempuan Hindu Bali bisa mengambil peran publiknya di berbagai bidang pekerjaan yang terbuka dalam masyarakat bebas Asean bila mereka memiliki kecakapan kompetitif di bidangnya. Kecakapan kompetitif itu bisa ditingkatkan melalui: (a) upaya pendidikan; (b) keterlibatan mereka sebagai aktivis LSM, aktivis organisasi massa, atau aktivis organisasi politik; (c) pengembangan diri perempuan Hindu Bali sehingga menjadi *luh luh*, yakni sosok yang terpelajar, memiliki kecakapan tertentu (profesional) tetapi tetap berpegang pada tradisi dan budaya Bali. Peningkatan profesionalitas dan penguatan sosio-kultural untuk menjadikan perempuan Hindu Bali sebagai *luh luh* perlu ditumbuhkembangkan.

singkat ini membahas: bagaimana upaya perempuan Hindu Bali dalam mengasah kemampuan kompetitifnya agar mampu merebut perannya di ranah publik?; agenda apa yang mereka lakukan agar mampu berpartisipasi dalam memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut?

II. Pembahasan

2.1 Gerakan Sosial Perempuan Hindu Bali Pasca Reformasi

Upaya perjuangan gender, dan peningkatan kecakapan kompetitif perempuan Hindu Bali bisa diasah melalui keterlibatan mereka dalam berbagai kancah gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara kolektif, kontinyu dan sistematis. Gerakan ini berupaya menentang keberlakuan tata kehidupan tertentu karena mereka memiliki kepentingan di dalamnya, baik secara individu, kelompok, komunitas, atau level yang lebih luas lagi (Wahyudi, 2005). Secara umum, gerakan sosial perempuan Hindu Bali pasca reformasi dilakukan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masa, dan organisasi partai politik.

Pertama, kaum perempuan Hindu Bali mengasah kecakapan dirinya melalui organisasi masyarakat, yakni Wanita Hindu Darma Indonesia (WHDI). Di samping menjadi wadah dalam menjalankan kegiatan sosial-keagamaan, melalui WHDI perempuan Bali didorong lebih kritis dalam menghadapi perubahan, dan mampu mendidik dan mendampingi putra-putrinya, mampu menjadi istri yang mendampingi para suami mereka dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga (*sukinah*). Namun, perjuangan perempuan Hindu Bali melalui WHDI belum sepenuhnya mampu memperjuangkan kesetaraan gender bagi kaum perempuan. Kegiatan WHDI secara umum masih relative serupa dengan perjuangannya organisasi-organisasi perempuan sebagai alat politik gender bentukan pemerintah Orde Baru (Orba), termasuk Dharma Wanita (organisasi yang menghimpun para istri pegawai negeri), Dharma Pertiwi (istri anggota TNI) dan PKK. Melalui ketiga organisasi inilah rejim Orba mengontrol perempuan Indonesia di seluruh lapisan masyarakat dan menempatkan perempuan Indonesia dalam posisi sebagai subornat laki-laki. Program Pokok PKK misalnya lebih mengarahkan kaum perempuan untuk menangani urusan domestik, sehingga tidak mempunyai peluang untuk memikirkan masalah-masalah publik, termasuk memikirkan masalah politik (Sukiada, 2004: 16).

Kedua, pemerintah telah memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi di bidang politik, yakni dengan memberikan quota 30 % bagi perempuan untuk menjadi anggota dewan (UU Pemilu No.10 Tahun 2008). Kendati sudah diberikan quota 30%, namun kenyataannya hal ini masih terasa sulit diwujudkan. Anggota dewan perempuan di DPRD Provinsi Bali dalam periode 1971-2014 hanya berkisar 1,82% - 11,11%.

Masuknya kaum perempuan sebagai anggota dewan memiliki arti penting bagi kesinambungan dan keadilan pembangunan. Isu-isu atau segala persoalan pembangunan yang selama ini melilit 'kaum hawa' telah memperoleh porsi respon yang semestinya, termasuk isu keterbelakangan pendidikan kaum perempuan, pecehan seksual,

deskriminasi hukum, hak upah yang masih rendah untuk pekerja perempuan sampai kasus TKW yang cenderung masih merugikan harkat dan martabat kaum perempuan. Melalui gerakan sosial politik di parlemen, masalah deskriminasi terhadap kaum perempuan yang terjadi di berbagai lapangan kehidupan, termasuk kehidupan sosial, ekonomi, hukum dan politik dicarikan jalan pemecahannya. Berbagai masalah yang 'memasung' kemerdekaan kaum perempuan berupaya direspon.

Ketiga, kecakapan diri perempuan Bali juga bisa diasah dan diwujudkan melalui pengembangan peran mereka di sektor publik. Sejalan dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan peluang yang ada, perempuan Hindu Bali kini telah banyak yang terjun di ranah peran publik. Mereka telah berhasil menjadi pekerja di berbagai sektor, baik formal maupun non formal, termasuk yang menggeluti bidang pariwisata. Meningkatnya peran perempuan Bali di sektor publik dilatarbelakangi oleh budaya jengah. Menurut Mantra (1993) *jengah* merupakan sifat dinamis yang dimiliki oleh budaya itu, yaitu suatu gerak spiritual yang menjadi pangkal segala perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Keterlibatan perempuan Bali dalam sektior publik di lapangan bisnis pariwisata masih relatif terbatas. Hanya sebagian kecil perempuan berhasil menduduki posisi menajer puncak (1%). Mayoritas mereka hanya berperan menjadi karyawan atau staf biasa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: (a) *skill* dan profesionalitas perempuan Hindu Bali yang belum optimal karena mereka kurang disiplin waktu dan tidak memanfaatkan kesempatan dalam pengembangan kepribadian kapasitas diri melalui pendidikan/pelatihan; (b) adanya keterikatan dengan keluarga, yakni terikat dalam pekerjaan domestik dalam mendampingi suami dan mengasuh anak yang lebih diutamakan dari pada tekun bekerja; dan (c) adanya keterikatan dengan adat di tempat tinggalnya (Karmini, 2011).

2.2 Mengukuhkan Konstruksi Sosio-kultural *Luh Luth*

Pertemuan para pemimpin negara-negara Asean tahun 2003 di Bali melahirkan kesepakatan atas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, yakni menciptakan relasi dan persaingan tanpa batas. Ciri-ciri utama MEA antara lain: (a) Asean menjadi kawasan keonomi yang sangat kompetitif, (b) memiliki wilayah pembangunan ekonomi yang merata, (c) daerah-daerah terintegrasi secara penuh dalam ekonomi global, (d) basis dan pasar produksi tunggal. Konsekuensi MEA adalah terciptanya pasar tunggal dan bebas yang juga berarti bebasnya aliran barang, jasa, modal, investasi dan tenaga kerja di wilayah Asean. Pelaku usaha perempuan dianggap memiliki potensi untuk menggerakkan ekonomi rakyat dalam menghadapi MEA. Mengingat bahwa sebagian besar pelaku usaha di Indonesia, khususnya home industry dan UKM adalah kaum perempuan.

Kerjasama ekonomi negara-negara Asean ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi sebaliknya, MEA justru menjadi ancaman dan justru berkontribusi besar terhadap peningkatan angka kemiskinan. Untuk itu, dalam menghadapi MEA, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan sebuah keharusan. Agar mampu bersaing, sesuai teori praktik sosial Bourdieu (1990), perempuan Hindu Bali harus bisa

menguatkan modal sosial, ekonomi dan simboliknya dengan meningkatkan kapasitas dan *skill*-nya melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan sesuai minat dan bakat mereka.

Angkatan kerja perempuan di Bali pada umumnya masih berpendidikan rendah (SD sebanyak 38%), bahkan masih ada yang tidak pernah sekolah (9%). Mereka terjun diberbagai lapangan pekerjaan dan sebagian mereka menjadi buruh/pekerja kasar (lihat Tabel 1).

Tabel 1
Penduduk Provinsi Bali (15 Tahun ke Atas)
Menurut Jenis Pekerjaan/Jabatan Pekerjaan Utama Tahun 2014

Jenis Pekerjaan/Jabatan		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tenaga Profesional dan Teknisi	87 194	73 093	160 287
2	Tenaga Kepemimpinan & Ketatalaksanaan	30 818	7 479	38 297
3	Pejabat Pelaksana &Tenaga Tata Usaha	92 149	86 975	179 124
4	Tenaga Usaha Penjualan	165 183	267 101	432 284
5	Tenaga Usaha Jasa	112 418	77 221	189 639
6	Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	276 834	248 107	524 941
7	Tenaga Produksi, Operator Alat-alat Angkutan, dan Pekerja Kasar	457 078	260 838	717 916
8	Lainnya	26 914	3 230	30 144
Jumlah :		1 248 588	1 024 044	2 272 632

Sumber: BPS Provinsi Bali 2015

Perempuan Hindu Bali bisa meraih peran publiknya dalam era Masyarakat Ekonomi Asean bila memiliki kecakapan kompetitif di bidangnya. Perempuan Hindu Bali yang bisa mengambil peran dalam era MEA tersebut adalah *luh luhi*, yakni sosok perempuan Hindu Bali yang berguna bagi keluarga dan masyarakatnya. Menjadi anak *luh luhi* merupakan idaman setiap perempuan Hindu Bali. *Luh luhi* adalah sosok perempuan Hindu Bali yang mengerti dan mampu menjalani peran domestik sekaligus peran publik tanpa meninggalkan tradisi budayanya.

Walaupun kaum perempuan memiliki hak menduduki peran di berbagai bidang publik, tetapi mereka tidak bisa melepaskan begitu saja kodratnya sebagai ibu rumah tangga. Menurut Astiti (1999) peran perempuan sebagai ibu rumah tangga tetap yang utama karena di samping sebagai pendamping suami, mereka sebagai pendidik putra-putrinya di rumah. Seperti kata Anthony Giddens (1992) peran mendidik anak di rumah merupakan hal yang pertama

dan utama, agar anak-anak sebagai generasi penerus mampu menemukan jati dirinya secara sehat dan wajar.

Dalam sejarah pergerakan perempuan Hindu Bali, sosok *luh luh* bisa diwakili oleh I Goesti Ayoe Amba, aktivis perempuan Bali Utara yang dikenal terpelajar, bisa menyetir mobil, bermain tenis, mampu berbahasa Belanda, tetapi tetap taat menjalani tradisi (Putra, 2003). Di sini, perempuan terpelajar, tidak serta merta menjadi *luh luh* bilamana ia tidak menjalani tradisinya. Untuk itu, penguatan konstruksi sosio-kultural *luh luh* bagi perempuan Bali modern sangat penting. Upaya penguatan konstruksi sosio-kultural *luh luh* ini bisa diwujudkan apabila mendapat dukungan dari pihak keluarga dan masyarakat adatnya di satu sisi, serta adanya motivasi yang kuat untuk mau dari diri perempuan Bali yang bersangkutan di pihak lain.

Perempuan Hindu Bali yang ingin menjadi *luh luh* dengan berupaya meningkatkan karier dan prestasinya di bidang publik. Akan tetapi, partisipasi kaum perempuan dalam berbagai pekerjaan publik tidak otomatis menjadikannya lebih terhormat sebagaimana makna yang dimaksudkan dalam istilah *luh luh*. Keterlibatan kaum perempuan di bidang publik tidak selalu identik dengan pemberdayaannya. Dalam kehidupan masyarakat Bali, kaum perempuan tidak hanya dituntut untuk berhasil dalam kehidupan pribadi dan keluarganya, tetapi mereka diharapkan juga terlibat aktif dalam urusan adat masyarakatnya (Sunasri, 2003).

III. Simpulan dan Saran

3.1 Simpulan

Perempuan Hindu Bali bisa mengambil peran publiknya di berbagai bidang pekerjaan yang terbuka dalam masyarakat bebas Asean bila memiliki kecakapan kompetitif di bidangnya. Kecakapan kompetitif itu bisa diasah melalui: (a) upaya pendidikan; (b) keterlibatan mereka sebagai aktivis LSM, aktivis organisasi massa, atau aktivis organisasi politik; (c) menjadikan perempuan Hindu Bali sebagai *luh luh*, yakni sosok yang terpelajar, memiliki kecakapan tertentu (profesional) tetapi tetap berpegang teguh pada tradisi dan budaya Bali.

3.2 Saran

Peningkatan profesionalitas dan penguatan sosio-kultural untuk menjadikan perempuan Hindu Bali sebagai *luh luh* perlu dikembangkan.

Daftar Pustaka

- BPS Provinsi Bali. 2015. Keadaan Ketenagaan Kerja Provinsi Bali Tahun 2014. Berita Resmi Statistik Provinsi Bali.
- Bourdieu, Pierre. 1990. (*Habitus X Modal*) + *Ranah-Praktik*: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Bourdieu. Bandung: Jalasutra. Sumber terjemahan An Introduction to the work of Pierre Bourdieu: The Practice Theory. Editor Richard Harker. 1990. The Macmillan Press Ltd: London.
- Giddens, A. 1992. *Sosiologi*. UK: Polity Press.
- Karmini, Ni Wayan. 2011. Keterpinggiran Perempuan Hindu Pekerja Hotel Bintang Lima Di Kawasan Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Denpasar: Program Pascasarjana, Universitas Udayana

- Mantra, I.B.1993. *Bali:Masalah Sosial dan Modernisasi*. Denpasar:PT Upada Sastra.
- Putra, I Nyoman Darma. 2003. *Wanita Bali Tempo Doeloe Perspektif Masa Kini*, Penerbit Yayasan Bali Jani, Gianyar. Cetakan I
- Sukiada, I Nyoman Politik. 2004. *Gender Orde Baru Dan Keterpinggiran Perempuan Bali Dalam Kancah Politik* (makalah lepas). Denpasar: Fakultas Sastra, Universitas Udayana.
- Sunasri, A.A Ayu Rai. 2008. *Perempuan Indonesia dan Diskursus Quota Caleg 30%*; Makalah lepas; Dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Budaya "Sisi Lain Pemilu" di Denpasar, 28 Oktober 2008.
- Wahyudi (2005), dalam bukunya yang berjudul *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani: Studi Kasus Reklamasi/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang*.
- Wangke, Humphrey. 2014. *Peluang Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi Asean 2015*, Jurnal Info Singkat (Hubungan Internasional), Vol. VI, No. 10/II/P3DI/Mei/2014.